



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
PANITIA KERJA SELEKSI CPNS TAHUN 2021
KE KANTOR REGIONAL VII BKN PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TANGGAL 20 s.d.22 JANUARI 2022**

I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
TANGGAL 30 JANUARI 2022**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
PANITIA KERJA SELEKSI CPNS TAHUN 2021
KE KANTOR REGIONAL VII BKN PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TANGGAL 20 s.d. 22 JANUARI 2022**

I. PENDAHULUAN

Tahapan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021 telah selesai dilaksanakan. Banyak kecurangan yang dilakukan oleh oknum peserta yang menyeruak ke ruang publik. Berdasarkan laporan dan yang beredar di media, kecurangan tersebut setidaknya muncul beberapa titik lokasi (tilok) mandiri dengan berbagai modus yang berbeda. Salah satu kasus kecurangan yang ditemukan adalah dengan menggunakan modus *remote access* yang memungkinkan seseorang berada di lokasi berbeda mengakses komputer yang digunakan peserta saat tes berlangsung.

Berdasarkan laporan pemerintah, terdapat 225 peserta CPNS tahun 2021 yang telah didiskualifikasi oleh pemerintah karena terbukti telah melakukan kecurangan. Menindaklanjuti kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2021, sebagaimana disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tim Panja Seleksi CPNS 2021 melakukan kunjungan ke Kanreg VII BKN Palembang untuk mendalami secara langsung terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul di lapangan. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan fungsi pengawasan di bidang ASN yang merupakan ruang lingkup Komisi II DPR RI.

Kunjungan kerja ini dianggap penting untuk mengetahui berbagai faktor penyebab terjadinya kecurangan. Sehingga diharapkan pada seleksi penerimaan CPNS dan PPPK yang akan datang pemerintah melakukan upaya perbaikan dan langkah antisipasi terutama terkait dengan sistem keamanan data pada sistem CAT BKN.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Panja Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2021 dibentuk oleh Komisi II DPR RI dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, sebagaimana diatur dalam pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi: "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan." Panja Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2021 Komisi II DPR RI secara khusus melakukan pengawasan dalam proses seleksi penerimaan CPNS tahun 2021.

b. Tujuan

Adapun tujuan Panja Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2021 adalah untuk memperoleh data dan informasi terkait (potensi) kecurangan-kecurangan dalam proses penerimaan CPNS tahun 2021. Kegiatan panja ini diharapkan dapat

memastikan pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS pada gelombang selanjutnya dapat terlaksana dengan lebih baik, transparan, dan akuntabel.

III. KEGIATAN PANJA

Menindaklanjuti kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2021, Panja Seleksi Penerimaan CPNS 2021 melakukan kunjungan spesifik ke Kanreg VII BKN Palembang, Sumatera Selatan, yaitu pada Tanggal 20 Jan 2022. Adapun nama-nama tim kunjungan adalah sebagai berikut:

| NO. | NO. ANGGOTA | N A M A | KETERANGAN |
|-----|-------------|---|---|
| 1. | A-142 | Dr. Junimart Girsang, SH., MBA., MH. | Ketua Tim Wakil Ketua Komisi II/F-PDIP |
| 2. | A-367 | Saan Mustopa, M.Si. | Wakil Ketua Komisi II/ F-P. Nasdem |
| 3. | A-462 | Dr. H. Syamsurizal, SE., MM. | Wakil Ketua Komisi II/ F-PPP |
| 4. | A-146 | M.R. Ihsan Yunus, BA., B.Comm., ME.Con. | Anggota/ F-PDIP |
| 5. | A-246 | H. M. Rifqinizami Karsayuda, SH., MH | Anggota/ F-PDIP |
| 6. | A-319 | DR. H. Ali Mufthi, S.Ag., M.Si. | Anggota/ F- PG |
| 7. | A-100 | Prasetyo Hadi | Anggota/ F-P. Gerindra |
| 8. | A-080 | Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc. | Anggota/ F-P. Gerindra |
| 9. | A-386 | Drs. Y. Jacki Uly, M.H. | Anggota/ F-P. Nasdem |
| 10. | A-15 | H. Yanuar Prihatin, M.Si | Anggota/ F-PKB |
| 11. | A-541 | H. Mohammad Muraz, SH., MM. | Anggota/ F-PD |
| 12. | A-455 | K.H. Aus Hidayat Nur | Anggota/ F-PKS |
| 13. | A-484 | Drs. H. Guspari Gaus, M.Si. | Anggota/ F-PAN |

Kegiatan ini beranjak dari beberapa kasus kecurangan sebagaimana muncul dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Badan Siber dan Sandi Negara, pada tanggal 15 November 2021.

IV. HASIL KUNJUNGAN KE KANREG VII PALEMBANG

A. Tindakan Mengantisipasi Terjadinya Kecurangan

Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara telah menyelenggarakan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non-Guru Formasi 2021 pada Tahun 2021 di wilayah kerjanya meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Masing-masing instansi telah melaksanakan perhitungan jumlah dan jenis kebutuhan pegawai per jabatan, redistribusi Pegawai Negeri Sipil serta proyeksi kebutuhan

Pegawai Negeri Sipil untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dari hasil perhitungan kebutuhan pegawai tersebut, masih terdapat kekurangan pegawai pada jabatan-jabatan tertentu, yang antara lain juga dikarenakan terdapat pegawai yang memasuki Batas Usia Pensiun dan pembentukan organisasi baru;

Badan Kepegawaian Negara sebagai bagian dari pemerintah yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengembangan sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Selama pelaksanaan seleksi CPNS di wilayah Kanreg VII BKN Palembang tidak terdeteksi adanya kecurangan. Sebelumnya telah dilakukan antisipasi terhadap kemungkinan adanya kasus kecurangan dalam seleksi CPNS tahun 2021 diberbagai daerah. Bersama BKN dan instansi yang tergabung dalam Panselnas, Kanreg VII Palembang telah berupaya melaksanakan SKD CPNS 2021 dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel dan aman melalui beberapa tahapan persiapan mulai dari aspek teknologi, proses dan SDM-nya.

Para petugas BKN yang akan melaksanakan tahapan seleksi CASN telah menandatangani Pakta Integritas. Khusus untuk petugas yang menangani data sensitif, di samping menandatangani Pakta Integritas, mereka juga harus menandatangani dokumen Non Disclosure Agreement (NDA) yang mengatur kewajiban dan larangan yang lebih rinci. Namun kasus kecurangan ini menjadi lesson-learned bagi BKN dan instansi terkait untuk memperbaiki sistem (teknologi, proses dan SDM) dan mempersiapkan pelaksanaan di tahun berikutnya dengan lebih baik lagi sehingga membantu dalam meningkatkan Kembali kepercayaan masyarakat.

Jumlah titik lokasi mandiri di wilayah kerja Kanreg VII BKN Palembang sebagai berikut:

Untuk tes SKD ada di 6 Titik Lokasi (Sultan Convention Center, Gedung Dharma Wanita Kab. Musi Banyuasin, Gedung Takraw Kab. Muara Enim, Gedung Narapraja IT Lab Kab. OKU, SMKN 2 Kota Lubuklinggau, SMPN 1 Martapura). Sedangkan untuk **tes SKB** ada di 3 Titik Lokasi (Golden Sriwijaya Building, Gedung Narapraja IT Lab, SMPN 1 Martapura).

Pemilihan titik lokasi mandiri dilakukan sepenuhnya oleh instansi berdasarkan standar minimum yang telah ditentukan oleh Panselnas sebagaimana tertuang pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 2 Tahun 2021 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara di Lampiran III terkait Spesifikasi Sarana dan Prasarana untuk Pelaksanaan Seleksi.

Untuk mencegah peretasan, BKN bersama dengan unsur Panselnas telah menyiapkan seluruh aspek (regulasi, sistem, SDM, teknologi) yang diperlukan untuk

dapat menyelenggarakan seleksi CASN tahun 2021 dengan protokol kesehatan COVID-19.

Adapun persiapan yang dilakukan antara lain:

- a. mengamankan soal dengan cara enkripsi dengan kunci gabungan yang hanya dimiliki oleh Kemen PANRB, BSSN, dan BPKP.
- b. Melakukan audit teknologi terhadap sistem CAT BKN oleh BPPT dan IT Security Assessment, serta penerapan maximum security oleh BSSN, mulai dari pengujian terhadap jaringan yang digunakan di Data Center BKN dan Cloud Telkom dari serangan, pelaksanaan hardening atau proteksi dan forensik digital apabila terjadi insiden keamanan.
- c. Menyiapkan inovasi face recognition, QR code registrasi browser yang akan digunakan
- d. Menyiapkan backup link dan backup server
- e. Menyiapkan VPN di lokasi Kanreg dan UPT BKN
- f. Menyiapkan regulasi, SOP, panduan teknis, dan Pakta Integritas
- g. Melakukan pembekalan teknis dan penyegaran SOP bagi tim yang akan bertugas
- h. Melakukan monitoring di sisi server dan jaringan, termasuk monitoring serangan melalui ISP

Secara garis besar, potensi kecurangan di masa lalu telah diantisipasi dengan berbagai persiapan di atas. Di BKN sudah ada bbrp mekanisme untuk pelaporan kecurangan, yaitu sms, lapor aduan, surat form aduan (<https://www.bkn.go.id/homepage/lapor-bkn>) Sosialisasi yang dilakukan Kanreg VII BKN Palembang melalui website Kanreg VII BKN Palembang, sosial media resmi (Facebook dan Instagram), Youtube Resmi, Whatsapp Resmi dan lapor.go.id. Apabila ada laporan dugaan kecurangan, akan dibahas dan diteruskan hingga ke Panselnas Pusat. Selama pelaksanaan seleksi CPNS di wilayah kerja Kantor Regional VII BKN Palembang tidak ditemukan indikasi kecurangan.

B. Hasil Evaluasi

Hasil Evaluasi Kanreg VII BKN Palembang terhadap pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2021 di Provinsi Sumatera Selatan sudah baik, sesuai dengan prosedur penyelenggaraan seleksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021. Dalam hal tindak lanjut penanganan kecurangan SKD CPNS, BKN berupaya melakukan hal-hal sebagai berikut:

Secara Internal:

1. Sumber Daya Manusia
 - a. Pembekalan Teknis dan Pengamanan TI bagi petugas di lapangan
 - b. Pengacakan/Rolling petugas CAT
2. Monitoring dan Pasca Insiden
 - a. Pendampingan forensik digital BSSN

- b. Memastikan tidak ada penyalahgunaan PIN sesi dan PIN peserta
 - c. PIN tidak berhubungan dengan paket soal SKD
3. Regulasi
- a. Penguatan SOP Pengamanan PC
 - b. Checklist & panduan keamanan TI
 - c. Pengetatan dalam penentuan Tilok
 - d. Tilok bermasalah akan dialihkan ke Tilok Kanreg BKN

Secara Eksternal:

1. Penguatan keamanan sistem dan teknologi CAT BKN
 - a. Membuat secured OS dengan sistem operasi Linux (hanya ada browser)
 - b. Wajib digunakan saat SKB di seluruh tilok
 - c. Koordinasi dan kolaborasi dengan BSSN dan BPPT
2. Diskualifikasi peserta
 - a. Surat diskualifikasi sudah disampaikan pada instansi
 - b. Pelaporan ke APH
3. Scanning seluruh peserta
 - a. Dilakukan terhadap 2 juta peserta SKD
 - b. Ditemukan tambahan potensi kecurangan sehingga total menjadi 16 tilok, 25 instansi, 375 peserta.

Berdasarkan hasil evaluasi itu, BKN memiliki catatan sebagai berikut:

1. BKN menyarankan dalam pelaksanaan Seleksi CASN tidak terpusat dalam satu waktu;
2. Formasi CASN lebih fleksibel sesuai kebutuhan instansi;
3. Waktu pelaksanaan Seleksi SKD bisa dilakukan kapan saja dan di fasilitas BKN sehingga tidak perlu adanya anggaran tambahan pada instansi.

V. REKOMENDASI

Panja Seleksi CPNS Tahun 2021 Komisi II DPR RI, menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Panja Seleksi CPNS Komisi II DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses pelaksanaan seleksi CPNS, terutama menyangkut beberapa hal, antara lain:
 - a. Integritas seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan seleksi CPNS;
 - b. Perbaikan terhadap prosedur dan tata tertib terutama pada saat pelaksanaan tes di setiap tahapan berlangsung;
 - c. Kebijakan pelaksanaan seleksi CPNS di titik lokasi mandiri;
 - d. Peningkatan sistem keamanan *server* CAT BKN dan seluruh perangkat teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan seleksi CPNS;

- e. Komunikasi dan sosialisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama menyangkut keengganan pemerintah daerah dalam pengajuan formasi CPNS.
2. Panja Seleksi CPNS Komisi II DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan audit digital forensik untuk menyelidiki secara lebih mendalam pangkal kecurangan dan sekaligus untuk memastikan sistem teknologi yang digunakan dalam seleksi CPNS ke depan aman digunakan.
3. Panja Seleksi CPNS Komisi II DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan sinkronisasi antara penyusunan dan penetapan kebutuhan PNS dengan ketersediaan anggaran baik APBN maupun APBD. Hal ini penting dilakukan agar kebutuhan PNS dapat terpenuhi sehingga kinerja instansi pemerintah dapat berjalan secara optimal.
4. Panja Seleksi CPNS Komisi II DPR RI meminta pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi terkait sistem laporan pengaduan yang dapat diakses oleh peserta ataupun masyarakat ketika menemukan indikasi kecurangan dalam pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2021. Pemerintah juga harus bisa menyusun mekanisme untuk menindaklanjuti indikasi kecurangan yang disampaikan masyarakat ke media sosial.

VI. PENUTUP

Kunjungan kerja spesifik adalah penting bagi Komisi II DPR RI untuk mengetahui secara komprehensif berbagai faktor penyebab terjadinya kecurangan. Maka dengan demikian diharapkan pada seleksi penerimaan CPNS dan PPPK yang akan datang pemerintah dapat melakukan perbaikan yang komprehensif agar tindak kecurangan tidak terjadi kembali.

Dalam upaya perbaikan dan langkah antisipasi, terutama terkait dengan sistem keamanan data pada sistem CAT BKN, maka perlu pengkajian mendalam terhadap standart operating procedure yang telah diterapkan sehingga seluruh proses seleksi ASN dapat berlangsung secara adil dan transparan. Untuk itu, bagi yang berlaku curang dan oknum yang menyalahgunakan wewenang perlu segera ditindak tegas secepat mungkin sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tidak terulang di masa yang akan datang.

Jakarta, 30 Januari 2022

**PANJA SELEKSI CPNS TAHUN 2021
KOMISI II DPR RI**